

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PEMATANGSIANTAR**

¹Jos Martin Simanjuntak, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e-mail : josmartin@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e-mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Wico Jontarudi Tarigan, Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e - mail : icol180285@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kota Pematangsiantar. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data internal, bersifat primer. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan dengan mengarah kepada Standar Akuntansi Pemerintah di pemerintah pusat maupun daerah. Tehnik Analisis Data dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) dengan fakta yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Hasil analisisnya penelitian tentang laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar yang berupa realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun sementara itu masih ada laporan keuangan yang belum di sajikan di laporan keuangan tahunan seperti laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena perlu di tambahkan agar lengkap dan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Akrua, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Government Accounting Standards (SAP) in the presentation of financial statements at the Public Works and Spatial Planning office in the city of Pematangsiantar. This research method is descriptive qualitative. The data sources used in this study are internal data sources, primary. This type of research data is qualitative data, with the Application of Government Accounting Standards, namely PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards in Indonesia, it is mandatory to submit and compile financial statements by referring to Government Accounting Standards in the central and regional governments. Data Analysis Techniques by collecting financial report data at the Public Works and Spatial Planning Office of Pematangsiantar City. Analyze financial statements in accordance with Government Accounting Standards (PP No. 71 of 2010) with facts in the Public Works and Spatial Planning Office of Pematangsiantar City. The results of the analysis research on the financial statements of the Pematangsiantar City PUPR Office in the form of budget realization, balance sheets, operational reports, reports on changes in equity and notes to financial statements carried out by the Pematangsiantar City PUPR Office are in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards but in the meantime there are still financial statements that have



not been presented in the annual financial statements such as the Excess Budget Balance report and Cash Flow Statement because needs to be added to be complete and in accordance with PP No. 71 of 2010.

Keywords: Government Accounting Standards, Accruals, Financial statements

I. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP juga akan terwujud *good governance*, yang dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Sektor publik sering dinilai sebagai objek pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu rugi. Beberapa konsep pengelolaan sektor publik yang mempunyai tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam mengukur kinerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan melaksanakan struktur manajemen pemerintahannya yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang begitu baik. Salah satu cara untuk menilai kinerja akuntabilitas tersebut adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak berhasil dan tidak mempunyai tujuan yang tepat pada kinerja dapat menggagalkan rencana - rencana yang sudah disusun.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi permasalahan yang penting untuk di bicarakan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Banyak penemuan kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi perbincangan yang perlu dikaji lebih dalam. Ini bisa merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya pihak internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi yang menjadikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini sudah dibuktikan oleh opini *disclaimer* di beberapa instansi di Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* dilakukan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur audit pada beberapa pos yang disediakan. Rendahnya kualitas laporan keuangan itu disebabkan penyusunan laporan keuangannya yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, penyelenggara internal yang belum memadai dan kurangnya kinerja staf akuntansi yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Pematangsiantar merupakan salah satu instansi di pemerintahan yang harus melakukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sebagai instansi pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber dana dalam melakukan kegiatan pemerintah. Maka dari itu untuk membentuk transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar juga harus melakukan pelaporan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut berdasarkan aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.

Dalam mengatasi hal itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar harus mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kota Pematangsiantar?” Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pematangsiantar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah

Perkembangan Tahap Awal

Penerapan akuntansi pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Pada *system* pencatatan ini menurut (Halim, 2004) pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Setelah melakukan Reformasi Pemerintah melakukan pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah yang meliputi laporan realisasi Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya ditetapkanlah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Undang - Undang tersebut disebutkan bahwa Akuntansi Keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi Pemerintah yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkan SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, mau tak mau pemerintah harus beralih kepada *system* pencatatan *double entry*, pada *system* ini menurut (Halim, 2004) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali dalam sisi debit dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP basis ini pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis *cash towards accrual*.

Semenjak disusunnya laporan keuangan secara lengkap oleh Pemerintah Daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), berdasarkan laporan audit BPK - RI tersebut, masih sangat sedikit Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah perkembangan opini LKPD dari tahun 2006 - 2008 :

Tabel 1

Perkembangan opini LKPD

LKPD	WTP	WDP	TW	TMP
2006	4	326	28	106
2007	3	283	58	122
2008	8	217	21	47

Sumber : LHPS 1 Tahun 2009, (BPK, 2009) per 31 2009.

WDP = Wajar Dengan Pengecualian
TW = Tidak Wajar
TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapat opini WTP dari BPK-RI, dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, adalah kelangkaan sumber daya manusia aparatur (kelangkaan sarjana akuntansi) yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan Negara/daerah.

Perkembangan Tahap Kedua



Setelah kurang lebih lima belas tahun sudah berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 oktober 2010 di keluarkan Peraturan Pemerintah NO 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Karena dikeluarkannya peraturan tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pemerintah. Pada SAP berbasis akrual ini, ada perbedaan komponen laporan keuangan antara PP No24/2005 dengan PP No71/2010.

Tabel 2

Perbedaan Komponen Laporan PP No24/2005 dan PP No71/2010

PP No24/2005	PP No 71/2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok :	Komponen Laporan Keuangan Pokok :
1. Neraca	A. Laporan Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Lapooran Arus Kas	2. Laporan Peubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
4. Catatan atas Lapoorann Keuangan	B. Laporan Finansial
Laporan yang bersifat optional:	1. Neraca
a. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)	2. Laporan Operasional (LO)
b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	3. Laporan Arus Kas (LAK)
c. Catatan atas Laporan Keuangan.	4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

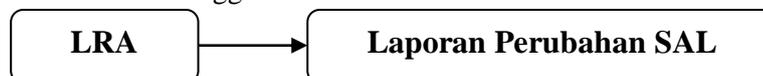
Sumber : PP No.71 tahun 2010

2. Hubungan antar laporan keuangan atas laporan

a. Laporan Finansial



b. Laporan Pelaksanaan Anggaran



3. Basis Pencatatan yang digunakan pada SAP lama yaitu basis kas menuju akrual, sedangkan SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.

4. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan akuntabel. Buku ini mencoba memberikan pemahaman dasar tentang teknik akuntansi pemerintahan daerah khususnya daerah kabupaten dan kota, bagi mahasiswa akuntansi yang mendalami akuntansi pemerintahan dan praktisi akuntansi pemerintahan daerah.

Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (PP No71 Tahun 2010).

Strategi Implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Cara pertama yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap-tahap, karena SAP berbasis akrual ini dilakukan secara bertahap dengan berdampingan dengan penyiapan sumber daya manusianya (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan langsung oleh kementerian atau lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus enerapkan SAP berbasis akrual. Penerapan penuh di semua kementerian atau lembaga pada tahun 2015.

- b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara sekaligus karena SAP berbasis akrual secara sekaligus di seluruh kementerian atau lembaga. Berikut ini Perkembangan Strategi penerapan SAP berbasis akrual secara Bertahap :

Tabel 3

Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap

2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual. 2. Penerbitan SAP Berbasis Akrual. 3. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>) 2. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 3. Pengembangan Kapasitas SDM
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) 2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ploting beberapa Kementerian/Lembaga (KL) dan Bendahara Umum Negara (BUN) 2. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK 3. Pengembangan kapsitas SDM (lanjutan)
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh LK 2. <i>Review</i>, Evaluasi dan konsolidasi seluruh LK 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penuh 2. Pengembangan Kapsitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP

Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus merujuk pada ketentuan-ketentuan Pemerintah, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 71 pada 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Meningkatkan Penggantian Peraturan Pemerintah 2 / 2005, termasuk *Acere's Cash Establishment* untuk standar akuntansi pemerintah. Mencapai lima Anggaran Pemerintah Daerah pada 2013 menggunakan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah pada 2 /2005. Perbedaan dasar dalam Peraturan Pemerintah No. 71 pada tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 berada dalam transaksi dan jenis laporan keuangan.

Menurut peraturan Republik Indonesia No. 71 pada tahun 2010 pada standar akuntansi pemerintah (Pasal 1: 1), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi terkait dengan pelatihan dan penawaran dan tingkat informasi keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah harus digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan kepada Komite Independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), SAP telah dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Standar Akuntansi Terperinci di Pemerintah dalam Laporan Keuangannya.

Keuangan untuk menciptakan tata kelola yang baik Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk yang merupakan aspek penting yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sangat perlu dikembangkan untuk meningkatkan praktik akuntansi keuangan dalam pengaturan organisasi pemerintah (Midiastuty, Puspa & Machfoedz, 2003).

Standar akuntansi pemerintahan digunakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan SAP yang berlaku di Indonesia, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, dampak peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah akan terletak pada Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (Febrian, 2005). Dibawah ini ada delapan prinsip yang digunakan pada akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah : (a) Basis Akuntansi, (b) Prinsip nilai perolehan, (c) Prinsip Realisasi, (d) Prinsip substansi mengungguli formalitas, (e) Prinsip periodisitas, (f) Prinsip konsistensi, (g) Prinsip pengungkapan penuh, (h) Prinsip pengajaran wajar.

Laporan Keuangan

Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010) laporan keuangan adalah pernyataan tempat atau posisi dalam keuangan dan transaksi atau hasil keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan terstruktur. Laporan keuangan Pemerintah tidak disampaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna, tetapi untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan.

Pengertian lain dari laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disusun atau disajikan dalam berbagai cara, misalnya, laporan arus kas atau laporan arus kas, catatan dan laporan lainnya serta penjelasan. dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan (IAI, 2007).

Dengan diterbitkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, tujuan penyampaian laporan keuangan secara keseluruhan adalah untuk menyampaikan informasi tentang status atau lokasi keuangan, kinerja keuangan, dan kinerja keuangan pembukuan, surplus anggaran, kas aliran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas. Laporan keuangan lebih banyak digunakan untuk membandingkan pendapatan, pengeluaran, transfer dan hibah dengan anggaran yang telah ditentukan, menilai posisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan akan berguna jika laporan keuangan memenuhi standar kualitatif. (Gitman, 2002). Menurut (Mardiasmo, 2004) secara umum tujuan dan fungsi pelaporan keuangan sektor publik adalah (1) Kepatuhan dan penyelenggaraan, (2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, (3) Perencanaan dan informasi otorisasi, (4) Kelangsungan organisasi, (5) Hubungan masyarakat, (6) Sumber fakta dan gambaran.

Peranan dan Tujuan Laporan keuangan

Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah siap menghadirkan informasi terkait tentang semua transaksi dan posisi keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah selama periode referensi (Munawir, 2010). Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan implementasi pendapatan dan pengeluaran untuk penggunaan anggaran dengan peraturan dan penilaian kondisi keuangan, evaluasi efektif dan efektivitas otoritas lokal dan berkontribusi pada tekad keunggulan saya untuk ketentuan peraturan (Munawir, 2010).

Tujuan Laporan Keuangan

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan saat menilai akuntabilitas dan saat membuat ketentuan ekonomi, sosial dan politik yang baik dengan (1) memberikan informasi apakah biaya seluruh pengeluaran sudah untuk menerima periode yang sedang berjalan, (2) apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan ataupun di tentukan pada peraturan perundang-undangan dengan memperoleh sumber daya ekonomi dan posisinya, (3) tentang kegiatan pemerintah daerah dengan hasil yang diperoleh dari segi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. (4) tentang cara menangani pemerintah daerah yang sangat lengkap tentang semua kegiatan dan memenuhi kebutuhan uang mereka. (5) tentang keuangan pemerintah daerah dan sumber pendapatan bersyarat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pendapatan pajak dan pinjaman. (6) mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, baik yang meningkat maupun yang menurun, sebagai akibat dari tindakan yang telah atau sedang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, ada beberapa bagian yang tertulis dalam suatu set laporan keuangan pokok yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus, Kalangi, & Walandouw, 2015) tentang Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dengan



menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, Selain itu peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sebaiknya pimpinan Kota Tomohon menyiapkan SDM yang tepat dibidang akuntansi agar hambatan - hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Langelo, Saerang & Alexander, 2015) tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung dengan menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa hasil penelitian pada pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

(Niu, Karamoy & Tangkuman, 2014) melaksanakan penelitian tentang Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dengan menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang *akuntabel* dan transparan.

(Ranuba, Pangemanan & Pinatik, 2015) meneliti tentang Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan dengan menggunakan metode kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPKPA selaku pengelola keuangan daerah kabupaten minahasa selatan sudah siap terhadap penerapan SAP berbasis akrual, hanya saja peran DPKPA sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu SDM untuk pengelola keuangan yang ada di setiap SKPD-SKPD tidak memiliki pendidikan dasar dibidang akuntansi. Sebaiknya pimpinan pada Pemda menyiapkan Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi di setiap SKPD. Agar hambatan - hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

Kerangka Pemikiran

Keuangan daerah perlu dikelola secara tertib dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi, efektifitas dan ekonomi. Fakta bahwa keuangan sektor adalah subjek dalam akuntansi sektor publik (Pemerintah) di mana data akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas, transparansi, transaksi bisnis, ekonomi dan keuangan yang terkait dengan pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya.

Ada kerangka pemikiran secara skematik yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Pematangsiantar



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data internal, bersifat primer. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan dengan mengarah kepada Standar Akuntansi Pemerintah di pemerintah pusat maupun daerah.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang telah dijalankan dengan cara menelusuri dan mendapat data laporan keuangan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Teknik Analisis Data dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) dengan fakta yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2007) Kepala Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada OPD. Laporan Keuangan OPD tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya dan serta perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya, hal ini mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah

sebesar Rp. 66.350.000,- atau mencapai 66,35 % dari total yang dianggarkan. PAD tidak tercapai dikarenakan rendahnya nilai pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun 2021 dimana kebanyakan penyewa alat berat adalah kontraktor di Kota Pematangsiantar. Disamping itu, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki juga kurang memadai dan tidak bisa dioptimalkan lagi. Realisasi belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 50.153.036.129,00 atau mencapai 94,85% dari total yang dianggarkan. Hal - hal yang mendasari tingkat ketercapaian mencapai 94,85 % adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 5.630.150.935,00
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.624.179.042,00
Belanja Modal : Rp. 29.898.706.152,00

Tabel 4

Laporan Realisasi Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	100.000.000,00	66.350.000,00	(33.650.000,00)
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	66.350.000,00	(33.650.000,00)
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum			
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus			
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus (DID)			
1 2 2 2	Dana Penyesuaian			
1 2 3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1 3 1	Pendapatan Hibah			
1 3 2	Pendapatan Dana Hibah			
1 3 3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2 1	BELANJA OPERASI			
2 1 1	Belanja Pegawai	5.862.734.733,00	5.630.150.935,00	(232.583.798,00)
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	15.776.164.841,00	14.624.179.042,00	(1.151.985.799,00)
2 1 3	Belanja Bunga			
2 1 4	Belanja Subsidi			
2 1 5	Belanja Hibah			
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial			
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan			
2 2	BELANJA MODAL			
2 2 1	Belanja Tanah			
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	380.607.400,00	365.712.000,00	(14.895.400,00)
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.099.968.773,00	998.981.550,00	(100.987.223,00)
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.757.113.767,00	28.534.012.602,00	(1.223.101.165,00)
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2 2 6	Belanja Aset Lainnya			
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2 3 1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			

NOMOR URUT		URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	
2	4	TRANSFER			
2	4	1 TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA			
2	4	1 1 Bagi Hasil Pajak			
2	4	1 2 Bagi Hasil Retribusi			
2	4	1 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
		Jumlah			
		SURFLUS/DEFISIT			
3		PEMBIAYAAN			
3	1	PENERIMAAN DAERAH			
3	1	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3	1	2 Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3	1	4 Penerimaan Pinjaman Daerah			
3	1	5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3	1	6 Penerimaan Piutang Daerah			
		Jumlah			
3	2	PENGELUARAN DAERAH			
3	2	1 Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3	2	3 Pembayaran Pokok Utang			
3	2	4 Pemberian Pinjaman Daerah			
		Jumlah			
		Pembiayaan Neto	52.876.589.514,00	50.153.036.129,00	(2.723.553.385,00)
3	3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	52.776.589.514,00	50.086.686.129,00	(2.689.903.385,00)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 61.300.000,- atau mencapai 122,6 % dari total yang dianggarkan. PAD tidak tercapai karena masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan di Kota Pematangsiantar dan kurangnya sarana dan prasarana. Realisasi belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 67.996.338.497,61 atau mencapai 94,10% dari total yang dianggarkan. Hal-hal yang mendasari tingkat ketercapaian mencapai 94,10% adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 5.978.988.692,00
Belanja Barang : Rp. 7.795.277.951,00
Belanja Modal : Rp. 54.222.071.854,61

Tabel 5
Laporan Realisasi Anggaran 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	50.000.000,00	61.300.000,00	11.300.000,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	50.000.000,00	61.300.000,00	11.300.000,00
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum			
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus			
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus (DID)			
1 2 2 2	Dana Penyesuaian			
1 2 3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1 3 1	Pendapatan Hibah			
1 3 2	Pendapatan Dana Hibah			
1 3 3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2 1	BELANJA OPERASI			
2 1 1	Belanja Pegawai	6.072.249.087,00	5.978.988.692,00	(93.260.395,00)
2 1 2	Belanja Barang	8.709.824.342,50	7.795.277.951,00	(914.546.391,50)
2 1 3	Belanja Bunga			
2 1 4	Belanja Subsidi			
2 1 5	Belanja Hibah			
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial			
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan			
2 2	BELANJA MODAL			
2 2 1	Belanja Tanah			
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	445.990.000,00	443.113.500,00	(2.876.500,00)
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	499.630.000,00	499.254.000,00	(376.000,00)
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.533.320.912,61	53.279.704.354,61	(3.253.616.558,00)
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2 2 6	Belanja Aset Lainnya			
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2 3 1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
2 4	TRANSFER			
2 4 1	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA			
2 4 1 1	Bagi Hasil Pajak			
2 4 1 2	Bagi Hasil Retribusi			
2 4 1 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Jumlah			
	SURFLUS/DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	PENERIMAAN DAERAH			
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah			
3 2	PENGELUARAN DAERAH			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah			
	Pembiayaan Neto	72.261.014.342,11	67.996.338.497,61	(4.264.675.844,50)
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	72.211.014.342,11	67.935.038.497,61	(4.275.975.844,50)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

Penjelasan : Realisasi Anggaran di tahun 2021 yang telah di anggarkan mengalami penurunan di bandingkan di Anggaran tahun 2020. Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Realisasi Anggaran tersebut ada di bawah ini.

1. Neraca

Laporan Neraca PUPR Kota Pematangsiantar menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dengan sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi neraca disusun oleh entitas - entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Berikut ini tabel laporan neraca.



Tabel 6
Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO (1)	URAIAN (2)	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021 (3)	TAHUN 2020 (4)
A	ASET		
I	ASET LANCAR		
	1 Kas di Kas Daerah		
	2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	3 Kas di Bendahara Penerimaan		
	4 Investasi Jangka Pendek		
	5 Piutang Pajak		
	6 Piutang Retribusi		
	7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara		
	8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah		
	9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional		
	12 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
	14 Piutang Lainnya	44.844.000,00	
	15 Persediaan	394.450,00	
	JUMLAH ASET LANCAR	45.238.450,00	0
II	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	2 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
	3 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
	4 Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	5 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom		
	6 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
	7 Investasi Permanen Lainnya		
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
III	ASET TETAP		
	1 Tanah		
	2 Peralatan dan Mesin	365.712.000,00	443.113.500,00
	3 Gedung dan Bangunan	998.981.550,00	499.254.000,00
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.534.012.602,00	53.279.704.354,61
	5 Aset Tetap Lainnya		
	6 Konstruksi dalam Pengerjaan	395.519.000,00	15.419.268.677,90
	7 Akumulasi Penyusutan		
	JUMLAH ASET TETAP	30.294.225.152,00	69.641.340.532,51
IV	DANA CADANGAN		
	1 Dana Cadangan		
	JUMLAH DANA CADANGAN		
V	ASET LAINNYA		
	1 Tagihan Penjualan Angsuran		
	2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		1.931.126.538,43
	3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)		
	4 Aset Tak Berwujud		
	5 Aset Lain-lain		
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	1.931.126.538,43
	JUMLAH ASET	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
B	KEWAJIBAN		
I	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	1 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	2 Hutang Bunga		
	3 Hutang Pajak		
	4 Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		
	5 Hutang kepada Pemda otonom Lainnya		
	6 Pendapatan Diterima Dimuka		
	7 Hutang Jangka Pendek Lainnya	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	1 Hutang Kepada Pemerintah Pusat		
	2 Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya		
	3 Pinjaman Luar Negeri		
	4 Pinjaman Dalam Negeri		
	5 Hutang Jangka Panjang Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
C	EKUITAS DANA		
I	EKUITAS DANA LANCAR		
	1 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.689.903.385,00	4.275.975.844,50
	2 Pendapatan Yang Ditangguhkan		
	3 Cadangan Piutang		
	4 Cadangan Persediaan		
	5 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang J. Pendek	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	4.979.183.752,50	9.663.587.542,90
II	EKUITAS DANA INVESTASI		
	1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
	2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94
	Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain		
	4 Dana yang disediakan untuk Pembayaran Hutang J. Panjang		
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94
III	EKUITAS DANA CADANGAN		
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
	JUMLAH EKUITAS DANA	35.273.408.904,50	81.236.054.613,84
	JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA	35.273.408.904,50	81.236.054.613,84

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Penjelasan :

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Neraca sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Neraca tersebut ada di bawah ini.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan Laporan Operasional, beban, transfer, dan pos - pos luar biasa.

Tabel 7
Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN	NILA (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEGIATAN OPERASIONAL		
A	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	66.350.000,00	61.300.000,00
B	BEBAN OPERASIONAL		
	1 Beban Pegawai	5.630.150.935,00	151.179.000,00
	2 Beban Persediaan	109.605.566,00	3.153.762.875,00
	3 Beban Jasa	2.736.165.667,00	2.435.679.367,00
	4 Beban Pemeliharaan	11.483.532.100,00	1.874.244.876,00
	5 Beban Perjalanan Dinas	294.875.709,00	251.566.333,00
	6 Beban Penyusutan dan Amortisasi		
C	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	20.187.979.977,000	7.805.132.451,000

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Penjelasan:

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Operasional sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos-pos Laporan Operasional tersebut ada di bawah ini.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN	NILA (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	EKUITAS AWAL		
	SURPLUS (DEFISIT) LO	20.187.979.977,00	7.805.132.451,00
	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		
	EKUITAS AKHIR	20.187.979.977,00	7.805.132.451,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Perubahan Ekuitas sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Laporan Perubahan Ekuitas tersebut ada di bawah ini.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*), sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar yang berasal dari dana APBD dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 52.876.589.514,00. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

b. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar sebesar Rp 66.350.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 66,35%. Pendapatan tersebut diperoleh dari Retribusi Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 5.862.734.733,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.630.150.935,00 atau sebesar 96,03%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 15.776.164.841,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 14.624.179.042,00 atau sebesar 92,70%. Belanja Modal diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan - kegiatan dan program. Pada Tahun. Anggaran 2021, belanja modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 31.237.689.940,00 dan terealisasi sebesar Rp 29.898.706.152,00 atau 95,71% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9

Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2021

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.607.400,00	365.712.000,00	96,09
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.099.968.773,00	998.981.550,00	90,82
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.757.113.767,00	28.534.012.602,00	95,89
	Jumlah	31.237.689.940,00	29.898.706.152,00	95,71

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

c. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar selama tahun 2021 antara lain disebabkan :

- Selisih harga antara Standar Saruan Harga Pemerintah dengan realisasi belanja;
- Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas;
- Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia;
- Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;

e) Jadwal penyusunan P.APBD Kota Pematangsiantar yang terlambat dari semestinya.

d. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah alat berat). Penerimaan Retribusi Daerah selama periode ini adalah sebesar Rp. 66.350.000,00 atau 66,35% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 5.050.000,00 atau 7,61%.

2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip - prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok dan Jenis Belanja

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5= (4/3)x100%
	BELANJA OPERASI			
511	Belanja Pegawai	Rp. 5.862.734.733,00	Rp. 5.630.150.935,00	96,03%
512	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.776.164.841,00	Rp. 14.624.179.042,00	92,70 %
	Jumlah	Rp. 21.638.899.574,00	Rp. 20.254.329.977,00	93,60%
	BELANJA MODAL			
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 380.607.400,00	Rp. 365.712.000,00	96,09 %
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 1.099.968.773,00	Rp. 998.981.550,00	90,82 %
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 29.757.113.767,00	Rp. 28.534.012.602,00	95,89 %
	Jumlah	Rp. 31.237.689.940,00	Rp. 29.898.706.152,00	95,71 %
	TOTAL	Rp. 52.876.589.514,00	Rp. 50.153.036.129,00	94,85%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

e. Penjelasan atas Pos - Pos Neraca

1. Persediaan

Persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2021 ini tercatat sebesar Rp. 394.450,00. Kondisi ini berbeda dengan keadaan Persediaan Tahun Anggaran 2020 dimana tidak ada barang persediaan.

2. Aset Tetap

a) Tanah

Nilai aset tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Akhir Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan nilai akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 720.306.807.783,00.

b) Peralatan dan Mesin.

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 365.712.000,00. Hal ini

dicatat lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang dicatat sebesar Rp. 443.113.500,00.

c) Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 998.981.550,00. Hal ini dicatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 249.486.000,00.

d) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Nilai Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 28.534.012.602,00. Hal ini dicatat lebih rendah dibandingkan dengan akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat sebesar Rp. 53.279.704.354,61.

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Akhir Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan nilai akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000,-

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2021 ini dicatat sebesar Rp. 395.519.000,00. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 990.114.690,00.

g. Kewajiban

Kewajiban pada Tahun Anggaran 2021 ini dicatat sebesar Rp. 2.289.280.367,50. Jumlah ini mengalami penurunan sangat signifikan jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 5.387.611.698,40.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010

Dibawah ini adalah data yang telah di terapkan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menurut PP No 71 tahun 2010 blum sepenuhnya siap, hal ini dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 11

Jenis Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih		✓
3	Neraca	✓	
4	Laporan Operasional	✓	
5	Laporan Arus Kas		✓
6	Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
7	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	

Berdasarkan tabel di atas laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar tidak menyediakan laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang spesifik seperti laporan - laporan yang di atas melainkan langsung tercatat di Laporan Realisasi Anggaran di akhir yaitu SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Selain itu juga Laporan Arus Kas juga tidak di lampirkan di laporan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, karena Kasubag Penyusun Program dan Keuangan mengatakan kalau laporan Arus Kas tidak di lampirkan di laporan Keuangan tahunan melainkan langsung di catat di Buku Kas Umum (BKU).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Realisasi Anggaran menyajikan laporan realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Didalam laporan realisasi



anggaran pendapatan dan belanja terdapat pos-pos sebagai berikut: pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, transfer dan pengeluaran daerah. Laporan Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

2. Neraca

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Neraca menyajikan informasi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir anggaran 2021. Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah mengkalifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya serta telah mengklasifikasikan kewajibannya dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah membandingkan antara neraca tahun 2021 dengan tahun anggaran 2020. Pos - pos dari neraca Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Operasional menyajikan pos-pos yaitu: Pendapatan LO, beban, surplus / defisit dari kegiatan operasional. Laporan Operasional Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos - pos yaitu: ekuitas awal, surplus / defisit - LO pada periode yang bersangkutan, koreksi - koreksi yang langsung menambah atau menurunkan ekuitas dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No71 tahun 2010.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi yang harus diterapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pernyataan - pernyataan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar yang berupa realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun sementara itu masi ada laporan keuangan yang belum di sajikan di laporan keuangan tahunan seperti laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena perlu di tambahkan agar lengkap dan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Kepada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sebaiknya melengkapi Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu PP No 71 tahun 2021 agar dengan adanya SAP juga akan terwujud *good governance*, yang dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. Perlu dilakukan perekrutan sumberdaya manusia (SDM) di bidang akuntansi yang mempunyai spesialis dan kemampuan untuk membuat penyajian laporan keuangan, serta melakukan seminar dan pelatihan-pelatihan teknis untuk pegawai (SDM) agar bisa lebih memahami lagi mengenai penerapan PP No71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Erlina, Damanik, E. O. P. ., & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.127>
- Gitman, L. (2002). *Principles of Managerial Finance* (10th ed.). In Pearson.
- Harahap, S. S. (2009). *Teorit Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumk Aksara. In Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iramani dan Erie Febrian. (2005). Financial Value Added: Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 413.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Lubis, S. M. Y. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mardiasmo. (2004). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In *Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah* (p. 3).
- Midiastuty, Pranata Puspa; Machfoedz, M. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance Dan Indikasi Manajemen Laba. *SNA* 6, 24.
- Munawir, S. (2010). *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Naibaho, Puteri Hoasi Perpetua. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat." (2018).
- Nasution, N. I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Pematangsiantar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Nasution, D. A. D., & Barus, M. D. B. (2019). *MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. "Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.4 (2014).
- Nordiawan, Dedy dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. "Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.4 (2014).
- Ranuba, Erlita DS, Sifrid Pangemanan, and Sherly Pinatik. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3.1 (2015).
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Saragi, R. U., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

-
- Kabupaten Simalungun. Jurnal Ilmiah Accusi, 3(2), 132–149.
<https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.176>
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Yunita, R. A. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).